PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

- Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
 31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1006);
 34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3002);
 35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.
7. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, shisha, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
14. Baku mutu udara dalam ruangan adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara dalam ruangan.
15. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
16. Memproduksi rokok adalah kegiatan yang menghasilkan Produk Tembakau.
17. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar menggunakan Produk tembakau yang ditawarkan.
18. Mempromosikan rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
19. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual,

- mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
20. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
 21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
 22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
 23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
 24. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya.
 25. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 26. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
 27. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
 30. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang selanjutnya disebut Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok adalah orang atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pengelola gedung yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk diantaranya adalah pengelola gedung yang menyewakan tempat kepada penyewa dan penyewa tempat di dalam gedung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:
- a. derajat kesehatan manusia dan lingkungan;
 - b. kemanfaatan umum;

- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. mewujudkan ruangan, kawasan dan area yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- c. memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mencegah timbulnya perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap orang wajib menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan tempat praktek profesi kesehatan.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi namun tidak terbatas pada mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib:

- a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melarang adanya tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memasang tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok dapat menetapkan peraturan pelaksana internal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area tempat proses belajar

mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai batas atau pagar terluar.

- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengelola, pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Larangan Memajang

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok.
- (2) Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan "Disini Tersedia Rokok".

Bagian Keempat
Larangan Menyelenggarakan Reklame Rokok dan Produk Tembakau

Pasal 24

Setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau baik di dalam ruangan (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

BAB V
PENANDAAN

Pasal 25

- (1) Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 26

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti; dan
 - c. pengumuman melalui suara yang mudah didengar dan dimengerti.
- (2) Penandaan berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah "KAWASAN TANPA ROKOK".

Pasal 27

- Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
- a. pencantuman dasar hukum, sanksi dan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. bahan yang dipakai untuk penandaan terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol penandaan harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan
 - c. tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 28

Penempatan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu kegiatan lain atau pergerakan orang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Walikota dan Bupati, dan SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian pencemaran udara dalam ruangan melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Walikota dan Bupati dan SKPD/UKPD.
- (3) Walikota dan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang keagamaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah;
 - d. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum;
 - e. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja; dan
 - f. SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan, bidang keolahragaan, bidang perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang pengawasan bangunan, bidang pertamanan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum dan tempat umum lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan untuk memastikan Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok mewujudkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik atau bentuk media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok; dan
- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan:

- a. inspeksi ke tempat dan/atau lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. membuat berita acara pengawasan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengatur Kawasan Tanpa Rokok di area tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 35

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan;
- d. lembaga; dan

e. organisasi.

Pasal 36

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a) menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok, dan perlindungan kesehatan dari bahaya merokok;
- b) ikut memfasilitasi dan membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 37

Peran masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mengusulkan suatu tempat atau area menjadi Kawasan Tanpa Rokok;
- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- f. melaporkan kepada Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Walikota dan Bupati, dan SKPD/UKPD terkait jika terjadi pelanggaran; dan
- g. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menerima dan menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang berperan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
 - d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 diikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembatasan terhadap pelayanan:
 - a. administrasi kependudukan; dan/atau
 - b. administrasi kesehatan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 diikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang memproduksi rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 48

Setiap orang yang menjual rokok di Tempat Umum dengan memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 49

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan orang merokok atau memproduksi rokok atau menjual rokok atau mengiklankan rokok atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 51

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya ruangan merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 52

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya asbak atau sejenisnya di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 53

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS pada Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah dan/atau kawasan;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksana yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai ada penggantinya yang baru.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Setiap tahun, 200.000 (dua ratus ribu) orang di Indonesia meninggal akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. Asap rokok adalah campuran gas dan partikel yang mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia mematikan yang biasa ditemukan di dalam produk seperti pelarut cat (aseton), pembersih toilet (amoniak), racun tikus (sianida), insektisida (DDT), dan asap knalpot (karbon monoksida). Sedikitnya 50 dari semua zat beracun tersebut dapat menyebabkan kanker dan penyakit serius lainnya.

Merokok telah menjadi bagian perilaku masyarakat di Indonesia sehari-hari. Saat ini sekitar 60 juta penduduk Indonesia merokok. Di provinsi DKI Jakarta, prevalensi konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya pada tahun 2010 adalah 30,8% dari jumlah penduduk berusia ≥ 15 tahun. Bahkan prevalensi merokok pada kelompok usia 13-15 tahun mendekati atau melebihi prevalensi merokok pada orang dewasa (41% pada remaja laki-laki dan 6,4% pada remaja perempuan). Yang sangat mengkhawatirkan pula adalah terjadinya peningkatan prevalensi merokok pada balita dan anak-anak berusia 5-9 tahun, dari 0,4% pada tahun 2001 menjadi 1,8% pada tahun 2004.

Dalam hal pajanan (exposure) terhadap asap rokok orang lain, sebanyak 51,3% (lima puluh satu koma tiga persen) penduduk dewasa atau 14,6 juta orang terpajan asap rokok di tempat kerja. Di dalam rumah, 78,4% (tujuh puluh delapan koma empat persen) penduduk dewasa atau 133,3 juta orang terpajan asap rokok. Sementara itu, 2/3 (dua per tiga) dari anak sekolah berusia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun di Indonesia terpajan asap rokok ketika berada di rumah, lebih dari 3/4-nya terpajan asap rokok di tempat lain di luar rumah dan hampir 3/4-nya memiliki setidaknya satu orang tua yang merokok. Anak-anak berusia 0-14 tahun dan perempuan adalah kelompok penduduk yang terpajan asap rokok paling banyak.

Ketika masyarakat belum sepenuhnya memahami resiko bahaya merokok dan asap rokok orang lain dan ketika resiko kematian dan kesakitan akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok semakin meluas, pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai bahaya merokok dan asap rokok serta menegakkan peraturan yang efektif untuk melindungi warganya khususnya anak-anak, remaja dan perempuan. Tidak ada kadar asap rokok yang bebas dari resiko. Pajanan yang singkat pun tetap berbahaya. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang 100% (seratus persen) bebas dari asap rokok, masyarakat akan terlindungi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peraturan tentang larangan

merokok di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok, yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Berdasarkan kaidah-kaidah logis dan bukti-bukti ilmiah, sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan 100% (seratus persen) tanpa asap rokok, artinya tidak ada kegiatan merokok di dalam Kawasan Dilarang Merokok.

Pada saat ini, penerapan peraturan perundangan tersebut telah menunjukkan tingkat ketaatan 51% (lima puluh satu persen) dari target 100% (seratus persen). Kemajuan penerapan peraturan tersebut harus dilanjutkan dan penegakan hukumnya diperkuat agar lebih efektif, diantaranya adalah mengatur tentang pencegahan anak-anak dan remaja menjadi perokok pemula dan sanksi denda terhadap pelanggaran.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 13 tentang Kawasan Dilarang Merokok melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan:

1. Meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
2. Menciptakan ruangan, kawasan dan area yang sehat dan bersih dari asap rokok;
3. Memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
4. Mencegah anak-anak dan remaja menjadi perokok pemula; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok telah memuat prinsip-prinsip dasar dan tata laksana penerapan dan penegakan Kawasan Dilarang Merokok yang cukup efektif sehingga dalam pelaksanaannya telah menunjukkan kemajuan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan harus diakomodir dan diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan langsung” adalah dengan adanya Peraturan Daerah ini masyarakat yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok akan terhindar dari asap rokok karena tidak ada satu orang pun yang akan merokok di kawasan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “perlindungan tidak langsung” adalah dengan diterapkannya Peraturan Daerah ini maka setiap orang di Daerah akan mendapatkan lingkungan yang nyaman, lebih bersih dan sehat dari asap rokok serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan olehnya baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun aspek lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perokok pemula” adalah orang yang baru pertama kali menghisap rokok secara aktif.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Peraturan yang dapat ditetapkan oleh para Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok harus tetap mengacu pada Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan menguatkan pelaksanaan dari isi maupun sanksi yang telah ditetapkan, bukan merupakan peraturan tersendiri atau bersifat melemahkan isi dan sanksi dari Peraturan Daerah tentang kawasan Tanpa Rokok ini.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan rokok di tempat umum hanya boleh dilakukan dengan cara tertutup dan diletakkan pada etalase tersendiri yang tertutup. Tanda yang bertuliskan "disini tersedia rokok" harus terpasang secara jelas dengan ukuran huruf dan warna yang terang dan menarik perhatian.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.

Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.